

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Nugraha, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas otonomi.

Undang-Undang tersebut merupakan wujud pemberian kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai daerah otonom untuk melaksanakan semua urusan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan mengembangkan suatu sistem perimbangan keuangan untuk mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah daerah secara transparan. Pengaturan, pembagian serta pemanfaatan sumber daya nasional, baik berupa uang maupun sumber daya alam untuk pembangunan daerah harus didasarkan pada prinsip otonomi daerah (Bastian, 2010).

Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan sektor publik yang lebih transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat menyediakan informasi tentang pengelolaan keuangan daerah secara luas. Maka

dari itu diperlukan laporan keuangan yang handal serta dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom yang mampu melaksanakan otonom daerah yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Bisma dan Susanto, 2010).

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu pemerintah daerah untuk menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk mendukung berjalannya sistem pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan tidak sepenuhnya bergantung kepada pemerintah pusat serta mempunyai fleksibilitas dalam menggunakan dana keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku (Syamsi, 1986).

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Meskipun laporan keuangann dibuat lebih umum dan sederhana agar mudah dipahami semua pihak, tetapi masih banyak yang belum memahami laporan keuangan dengan baik. Bahkan beberapa pihak sama sekali tidak tertarik dengan laporan keuangan. Hal itu wajar, karena beberapa pihak berasal dari latar belakang yang berbeda. Padahal semua pengguna laporan keuangan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan. Untuk

menganalisis laporan keuangan terdapat beberapa metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Mahmudi, 2019).

Pemerintah daerah perlu menganalisis laporan keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu dengan melakukan perhitungan rasio-rasio keuangan sehingga diperoleh hasil analisis rasio keuangan yang selanjutnya dapat dievaluasi, menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari laporan keuangan yang digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2019:90).

Dengan menggunakan analisis rasio keuangan pada APBD, pemerintah dapat mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat mengetahui pertumbuhan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2007).

Salah satu permasalahan terkait pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat yang dinilai masih sangat tinggi. Berdasarkan pidato penjelasan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang

(RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan 2019. Presiden Jokowi menjelaskan, belanja negara 2019 akan diarahkan salah satunya pada upaya penguatan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 sebesar Rp 832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9% dari perkiraan realisasi di tahun 2018. Dengan jumlah sebesar itu artinya pemerintah pusat taruh menaruh kepercayaan tinggi bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkannya kepada pemerintah daerah. Namun keadaan tersebut membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87% (Nughara, 2019).

Pada Kabupaten Manggarai tingkat ketergantungan fiskal masih dalam kategori tinggi terhadap dana tranfer pusat. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Kabupaten Manggarai adalah sebuah kabupaten yang berada di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Manggarai yakni Kecamatan Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 325.530 jiwa. Kabupaten Manggarai terdiri dari 12 Kecamatan, 26 Kelurahan, dan 145 Desa.

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di sebelah barat Pulau Flores. Kabupaten Manggarai mempunyai luas wilayah sebesar 2.046,44 km² yang terdiri dari daratan Pulau Flores dan Pulau Kecil yaitu Pulau Mules. Batas wilayah dari Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut: Utara : Laut Flores, Timur : Kabupataen Manggarai Timur, Selatan : Laut Sawu, Barat : Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai anggaran daerah Kabupaten Manggarai, dapat dilihat laporan realisasi dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Sumber Pendapatan			Total Pendapatan Daerah (Rp)
	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Lain-lain PAD Yang Sah (Rp)	
2018	89.904.635.200,78	956.555.834.690,00	51.487.747.250,00	1.097.948.217.140,78
2019	103.585.928.126,51	1.057.995.476.037,00	67.819.270.911,00	1.229.400.675.074,51
2020	96.873.499.070,67	1.000.203.346.522,41	59.260.621.544,00	1.156.337.467.137,08

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sedikit mengalami peningkatan. Hal ini pendapatan transfer pada tahun 2018, 2019 dan 2020 semakin meningkat sesuai dengan pengelolaan pendapatan asli daerahnya dan pendapatan lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tak Terduga (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Transfer (Rp)
2018	638.275.541.136,00	270.097.299.924,00	696.189.950,00	909.069.031.010,00	188.485.758.158,00
2019	711.101.343.290,00	260.133.775.217,00	1.875.651.147,00	973.110.769.654,00	214.332.167.693,00
2020	707.540.653.377,00	206.921.382.491,00	20.348.859.454,13	934.810.895.322,13	206.676.533.982,00

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2020 belanja operasi lebih besar dari belanja modal, hal ini

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi dibandingkan pengeluaran pembiayaan yang harus dapat memenuhi kebutuhan penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja BUMD. Belanja tak terduga dari tahun 2018 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga pengeluaran untuk belanja tak terduga pada tahun 2020 lebih besar pengeluaran belanjanya dibandingkan tahun 2018 dan 2019.

Tabel 1.3
Laporan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Total Pembiayaan (Rp)
2018	50.009.488.206,34	20.980.000.000,00	29.029.488.206,34
2019	28.988.734.054,12	9.750.000.000,00	19.238.734.054,12
2020	60.798.358.974,63	12.464.438.953,00	48.333.920.021,63

Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi NTT

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, disimpulkan bahwa penerimaan pembiayaan dari tahun 2018 dan tahun 2020 meningkat sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan. Pengeluaran pembiayaan dari tahun 2018 dan tahun 2020 lebih besar dibandingkan tahun 2019.

Fenomena yang ada di Kabupaten Manggarai berdasarkan tiga tabel di atas, maka secara garis besar kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai masih mengalami peningkatan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penggunaan dana tersebut belum diketahui pasti pengelolaannya untuk apa sehingga pemerintah Kabupaten Manggarai masih membutuhkan dana transfer tersebut dan tidak hanya itu, pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih rendahnya dalam mengelola dan menggali sumber-

sumber pendapatan asli daerah yang ada. Hal ini yang membuat peneliti untuk mengkoreksi kinerja yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai.

Berbagai penelitian mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Antara lain Iwaldus Pebri Mari dkk (2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012 sampai 2015, berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada pemerintah daerah pada Kabupaten Manggarai Barat adalah rata-rata sebesar 7,58 yang masuk dalam kategori rendah sekali. Dari hasil perhitungan rasio efektivitas pada pemerintah kabupaten Manggarai Barat menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa secara umum pemerintah daerah kabupaten Manggarai Barat tahun 2014-2015 menunjukkan adanya rasio pertumbuhan yang berfluktuasi. Ayu Kustia (2018) hasil penelitian analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dalam kategori masih rendah, rasio efektivitas dalam kategori sangat efektif dan rasio efisiensi dalam kategori efisien. Rindang Arumdari (2019) hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Rasio efektif termasuk dalam kategori kurang efektif, rasio pertumbuhan pendapatan pemerintah dari tahun bernilai negatif karena cenderung mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Kota Medan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2018-2020?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis rasio keuangan pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, peneliti dapat mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dan menambah pengetahuan dalam analisis laporan keuangan sektor publik dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi akademisi dan penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih lanjut penelitian di bidang akuntansi sektor publik, khususnya yang berminat dengan pembahasan mengenai analisis rasio kinerja keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

Kiranya dapat dijadikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Manggarai dalam mengelola kinerja keuangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui seberapa besar tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai dalam menghasilkan dan mengelola keuangannya serta untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat dijadikan sebagai alat pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Manggarai.